



Kelanjutan Pembangunan Kantor Bupati Menunggu Hasil Audit BPK

MELAWI-RK. Hingga saat ini, penyelenggaraan Pemerintahan Melawi belum pindah ke kantor baru. Karena proses pembangunannya tidak bisa dilanjutkan. Harus menunggu hasil audit dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Padahal sejak akhir 2018 lalu, Bupati Melawi, Panji sudah sangat menginginkan untuk pindah ke kantor bupati baru pada awal 2019.

"Awalnya kita memang ingin pindah paling tidak bulan tiga ini. Hanya

persoalannya karena pembangunan kantor bupati tidak menggunakan tahun jamak, maka harus dilakukan cut off atau menghitung berapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan," kata Panji, saat peresmian Gedung Serbaguna, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Panji memaparkan, bila penganggaran Kantor Bupati dilakukan dengan pola multiyears atau tahun jamak, semestinya banyak hal yang bisa dihemat, termasuk waktu pelaksanaan.

Proses lelang cukup dilakukan

sekali dan pembayarannya bisa dilakukan dalam dua tahun anggaran. Namun karena tak dikerjakan dengan tahun jamak, proses kelanjutan Kantor Bupati harus dimulai baru lagi dengan kembali menggelar tender.

"Persoalannya, pembangunan mungkin berjalan lancar bila perusahaan yang sama yang memenangkan

tender. Nah, kalau yang menang adalah perusahaan baru, tentu juga ia memerlukan waktu untuk melaku-

kan penyesuaian, melihat apa saja yang kurang dan mencari dari mana mulainya lagi," ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Melawi, Hinduansyah mengatakan, pemisahan ini harus menunggu proses audit dari Inspektorat.

Sehingga diketahui, mana pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan lama, dan mana yang akan menjadi tanggung jawab perusahaan baru kedepan.

Ia menuturkan, Perkimtan sendiri sudah siap untuk melanjutkan pembangunan Kantor Bupati, khususnya untuk penyelesaian gedung dan landskap. Yang mana perencanaan kelanjutan tersebut sudah dibuat sejak lama.

"Di APBD sudah dianggarkan Rp5,5 miliar untuk penyelesaian gedung. Yang belum selesai di antaranya ruang rapat, plafon serta pengecatan sejumlah bagian ruangan. Untuk landskap dan jalan masuk, dianggarkan Rp4,5 miliar,"

katanya.

Lanskap dilakukan untuk merapikan halaman gedung serta jalan yang saat ini masih berupa tanah kuning. Hanya karena pembangunan Kantor Bupati bukan multiyears, maka harus jelas pemisahan batasnya.

"Mana yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan baru, untuk melanjutkan pembangunannya," pungkasnya.

Reporter: Dedi Irawan
Redaktur: Andry Soe